

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Selama periode pemerintahan Orde Lama, tidak sedikit terjadi perubahan di Indonesia, baik dari segi kebijakan hingga sistem pemerintahan, hal ini menyebabkan kebijakan Orde Lama tidak sedikit menuai kontroversi bahkan menimbulkan pemberontakan, salah satunya yang terjadi di Aceh yaitu DI/TII Aceh tahun 1953, pemberontakan ini terjadi karena Soekarno mencabut status otonomi Aceh dan memasukan Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Solahuddin, 2011).

Berbeda dengan pemberontakan yang terjadi pada masa Soekarno, Pemberontakan di Aceh pada masa Soeharto terjadi karena ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan oleh pembaharuan sistem ekonomi oleh kebijakan PELITA I (1 April 1969 – 31 Maret 1974) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya, di prioritaskan untuk sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian. Tahun 1970 itu juga mulai menggalakkan penambangan minyak dan gas bumi menjadi \$10,6 miliar pada 1980. Kebijakan ini membuat Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dapat dikatakan mencapai sukses pembangunan ekonomi (Bandoro, 1995).

Pemberontakan daerah Aceh yang dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka melakukan pemberontakan ini karena merasa kebijakan pemerintah pusat yang sentralistik sehingga terlalu fokus pada pembangunan Jawa, dan mengabaikan daerah-daerah luar pulau Jawa. Hal inilah yang memicu konflik antara GAM dengan pemerintah Pusat (Jayanti, 2013).

Pemberontakan yang dilakukan GAM tidak dipimpin oleh seorang ulama, melainkan oleh penduduk lokal yakni Teungku Hasan Di Tiro yang menginginkan keadilan dari pemerintah pusat ketika Mengelola Aceh, hal ini dikarenakan distribusi pembagian hasil kekayaan yang tidak merata antara pemerintah pusat dan daerah (Ricklefs, 2008). Akar penyebabnya adalah persoalan ekonomi dan politik, tetapi keduanya berkombinasi dengan aspirasi, ideologi, kekecewaan, ambisi, serta kepentingan. Eksploitasi ekonomi dan politik bukan hanya terjadi pada masa Orde Baru, tetapi sudah dimulai sejak Belanda mengintegrasikan kesultanan Aceh ke dalam lingkungan politik nasional yang berpusat di Batavia. Kondisi ini berlangsung secara terus-menerus kecuali sekitar 5 tahun pada masa revolusi setelah Indonesia merdeka. Namun menjadi intensif kembali pada masa pemerintahan Soeharto, tepatnya ketika modal asing banyak mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam Aceh. Tetapi Aceh sendiri tetap miskin, terbelakang, dan terampas hak-haknya sehingga terciptanya kelompok yang tertindas (Basyar, 2008).

Hancurnya infrastruktur akibat peristiwa DI/TII Aceh yang berlangsung lebih lima tahun telah berdampak sangat buruk terhadap ekonomi Aceh secara keseluruhan. Peristiwa yang melibatkan sebagian besar tokoh Aceh tersebut telah mengakibatkan terjadinya kesulitan bagi masyarakat Aceh dalam bidang ekonomi. Ekonomi Aceh saat itu benar-benar tidak berputar, sehingga menyebabkan kehidupan rakyat sangat menderita. Hal ini disebabkan oleh terbengkalainya lapangan pekerjaan akibat kurang terjaminnya keamanan. Dengan banyaknya jalan dan jembatan yang rusak telah menyebabkan banyak wilayah yang terisolir. Akibatnya, kesejahteraan rakyat di daerah Aceh menurun drastis sehingga jauh tertinggal dari daerah lain di Indonesia (Hasjmy, 1995).

Tabel 1.1 Kondisi Jalan Raya di Aceh Tahun 1968

Kondisi	Panjang Jalan (Km)		Jumlah
	Negara	Provinsi	
Baik	137.032	77.136	214.168
Sedang	146.820	642.300	789.620
Rusak Ringan	127.244	257.520	384.364
Rusak Berat	78.304	308.544	386.848

Sumber : Aceh dalam Angka 1972, hlm. 185. Muhammad Ibrahim dkk.

Teungku Hasan Muhammad Di Tiro lahir di Pidie, Aceh, pada 25 September 1925 tepatnya di Kampung Tanjong Bungong Lameulo, sekitar 20 km dari Sigli. Teungku Hasan Muhammad Di Tiro adalah keturunan ketiga dari Tengku Syik Muhammad Saman di Tiro. Teungku Hasan

Muhammad Di Tiro merupakan anak kedua pasangan Tengku Pocut Fatimah dan Tengku Muhammad Hasan Tengku Pocut inilah cucu perempuan Tengku Muhammad Tanjong Bungong. Teungku Hasan Di Tiro memiliki abang kandung bernama Zainoel Abidin Tiro. Karena posisi Teungku Hasan Di Tiro sebagai keturunan Tengku Saman di Tiro itulah Teungku Hasan Muhammad Di Tiro dihormati oleh seluruh masyarakat Aceh (Ilhamsyah, 2018).

Pada tanggal 15 Maret 1968, Teungku Hasan Di Tiro menerbitkan buku *Atjeh bak Mata Donja* dalam bahasa Aceh di New York. Melalui kata demi kata ini, Teungku Hasan Di Tiro memberikan gagasan Nasionalisme Aceh yang mengatakan bahwa rakyat Aceh adalah bangsa di atas dunia seperti bangsa lain, mempunyai negeri sendiri, mempunyai bahasa sendiri yaitu bahasa Aceh dan mempunyai sejarah tersendiri yakni sejarah Aceh, untuk itu Teungku Hasan Di Tiro mendirikan lembaga *Atjeh Insitute* tahun 1960-an di New York (Tiro, 2013).

Gagasan mengenai Aceh merdeka sudah Teungku Hasan Di Tiro taburkan melalui buku *Masa Depan Politik Dunia melayu*, melalui buku ini Teungku Hasan Di Tiro menawarkan perombakan status NKRI menjadi negara Federal yang pembagian daerah menurut suku-suku bangsa, *Masa Depan Politik Melayu* yang terdiri dari tujuh bab ini membahas kejayaan Aceh abad ke-17, kehebatan melawan Belanda sejak 1873 sampai Desember 1937, imbauan kepada para patriot untuk merebut kemerdekaan Aceh yang hilang sejak 2 Desember 1911, serta semangat merdeka yang

menggebu telah dirintis Teungku Hasan Di Tiro sebelum tahun 1970-an (Tiro, 1984).

Pada Januari 1965, Teungku Hasan Muhammad Di Tiro menggagaskan ide Negara Aceh Sumatra Merdeka. apa yang dilakukannya dengan memproklamasikan Negara Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 merupakan puncak dari kekecewaan Teungku Hasan Di Tiro mengenai Indonesia dan manipulasi terhadap sejarah perjuangan Aceh yang kemudian melahirkan ide yang sudah disosialisasinya sejak tahun 1965. Ide mengenai Negara Aceh Sumatra diambil Teungku Hasan Muhammad Di Tiro berdasarkan sejarah wilayah Kesultanan Iskandar Muda. Pada masa jayanya kerajaan Aceh memang pernah sampai menguasai Lampung, Bengkulu, dan sebagian wilayah Malaysia (Sulaiman, 2000).

Pasca terjadi tragedi G30S/PKI tahun 1965, Soekarno diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Soeharto menjadi Presiden pada tahun 1968. Sejak pembangunan digulirkan Indonesia membutuhkan dana besar untuk memobilisasi ekonomi masyarakat dengan menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I pada 1969 (Ricklefs, 2008). Aceh direncanakan sebagai daerah pertanian. Para pelajar yang bergabung dalam Pelajar Islam Indonesia (PII) dan lain-lain di Banda Aceh menggelar demo pembagian hasil yang adil antara Aceh dengan pemerintah pusat (Hamzah, 2015).

Pada tahun 1966 pemuda Aceh memperjuangkan pembagian yang adil atas hasil tambang minyak di Rantau Aceh Timur, para pelajar dan pemuda Aceh berorasi serta menyebarkan spanduk-spanduk di Blang Padang Banda Aceh. Pawai itu menuntut Indonesia memberikan lima persen bagi hasil tambang minyak kepada Aceh dengan sebutan Alokasi Devisa Otomatis (ADO) (Raden, 2013). Mobile Oil mulai melakukan eksplorasi minyak bumi di Gampong Arun Lhoksukon Aceh Utara tahun 1969, Mobile Oil menemukan gas alam cair terbanyak di dunia dengan jumlah harta karun sebanyak 17,1 triliun mengubah wajah Aceh dari masyarakat agraris menjadi industri (Sari, 2018).

Rezim Orde Lama runtuh beralih ke rezim Orde Baru dengan menyelenggarakan pemilu pada Senin, 5 Juli 1971. Stabilitas di Aceh relatif kondusif. Pasca pemilu 1971, tahun 1972, Daud Beureueh mengirim Zainoel Abidin Tiro bertemu Teungku Hasan Di Tiro di Amerika Serikat, sukses mengirim delegasi pertama, disusul dengan delegasi kedua tahun 1974, dan delegasi ketiga atau terakhir pada tahun 1975, Muchtar Hasbi Geudong yang sedang berkuliah di Bangkok bertemu dengan Teungku Hasan Di Tiro di Bangkok. Semua pertemuan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Aceh lepas dari Indonesia, kesimpulan mengutus delegasi tersebut dengan satu tujuan yakni meminta Teungku Hasan Di Tiro mengorganisasikan sekaligus memimpin pergerakan nasional Aceh (Hamzah, 2015).

Teungku Hasan Muhammad Di Tiro merupakan deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976 di kawasan gunung Halimon Pidie. Teungku Hasan Muhammad di Tiro ikut keluar masuk hutan bersama pasukannya sejak 1976 untuk memperjuangkan pemisahan Aceh dari Indonesia. Perjuangannya secara gerilya dalam belantara hutan Aceh itu hanya berlangsung tiga tahun. Sejak mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pengakuan orang Aceh terhadap Teungku Hasan Muhammad Di Tiro bukan hanya karena perjuangannya sebab di dalam tubuhnya mengalir darah keturunan para pejuang Aceh (Arifin, 2011).

Sikap tegas Teungku Hasan Muhammad Di Tiro dalam menolak konsep Negara Kesatuan Indonesia merupakan proses pergolakan batin yang berlangsung lama, sebelum berangkat ke Amerika pada 1950, Teungku Hasan Muhammad Di Tiro merupakan pemuda yang terlibat aktif dalam berbagai organisasi keindonesiaan. Bersama abangnya, Zainul Abidin Di Tiro, Teungku Hasan Muhammad Di Tiro aktif dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI). Teungku Hasan Muhammad Di Tiro bahkan pernah menjabat Ketua Muda PRI di Pidie pada 1945. Ketika Wakil Perdana Menteri II dijabat Syafruddin Prawiranegara, Teungku Hasan Muhammad Di Tiro pernah menjadi stafnya. Atas jasa Syafruddin jugalah melalui rekomendasi Tengku Daud Beureueh, Teungku Hasan Muhammad Di Tiro kuliah pada Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan kemudian mendapat beasiswa Colombo Plan ke Amerika. Sembari menyelesaikan studinya di negeri Amerika Serikat, Teungku Hasan

Muhammad Di Tiro juga bekerja pada Kedutaan Indonesia. Artinya, pada suatu periode Teungku Hasan Muhammad Di Tiro pernah menaruh harapan besar terhadap Indonesia (Ilhamsyah, 2018).

Menurut Tiro, ratusan tahun sebelum Indonesia terbentuk, Aceh telah menjadi sebuah entitas politik sendiri, yang bukan saja besar dan makmur, tetapi juga diakui dunia internasional. Misalnya, tujuh tahun sebelum invasi pertama Belanda tahun 1873, dalam *Larouse Grand Dictionaries Universelle* telah menggambarkan bahwa Aceh-Sumatera adalah suatu bangsa yang dominan di Hindia. Informasi yang sama ditulis oleh *La Grande Encyclopedie* tahun 1874 juga menjelaskan kekuatan Atchin atau Achem yang dahsyat bertempur melawan serangan Portugis pada tahun 1582, dan bangsa ini tak terkalahkan. Sementara Damste dalam bukunya *Het Volk van Atjeh* menurut Tiro juga menyatakan bahwa ‘dari awal abad 17 perbatasan Aceh di Sumatera telah mencapai Selatan sampai Palembang dan Bengkulu dan di Semenanjung Malaya termasuk Perak, Kedah dan Pahang (Damaik, 2010).

GAM yang dipimpin Teungku Hasan Di Tiro di kenal oleh rakyat Aceh Sebagai Wali Negara Aceh Merdeka menyatakan, bahwa ideologi yang dipilihnya bukan Islam serta orientasi politiknya bukan pendirian negara Islam sebagaimana pendahulunya lakukan (Hamzah, 2015). GAM adalah simbolisasi dan institusionalisasi dari identitas politik ini. Akibatnya, Aceh yang tadinya hanya sekedar etnis dan kartografis telah bertransformasi menjadi identitas politik. Gerakan Aceh Merdeka didukung oleh tiga

kelompok masyarakat Aceh, yaitu golongan intelektual, golongan ulama serta golongan rakyat biasa (Benda, 1997).

Tujuan perjuangan Teungku Hasan Di Tiro untuk mewujudkan negara bersambung (*successor state*) dari kerajaan Aceh tempo dulu sebagai satu Kerajaan yang pernah ada dalam catatan sejarah negara-negara di dunia. Menurut seorang pengarang berkebangsaan Belanda yang bernama Boland, karena Aceh masih sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dan tidak pernah menyerahkan kedaulatannya pada Belanda, maka Belanda tidak menginvasi Aceh melalui agresi militernya baik yang pertama maupun yang kedua pada 1947-1948. Akan tetapi pada 27 Desember 1949 ketika Belanda menandatangani suatu perjanjian pemindahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat mengklaim bahwa semua daerah jajahan di Hindia Belanda di Nusantara menjadi daerah kekuasaan RIS, termasuk kerajaan Aceh di dalamnya, walaupun pada dasarnya Aceh tidak pernah ditaklukkan oleh Belanda (Ilhamsyah, 2018).

Menurut Teungku Hasan Muhammad Di Tiro, pemindahan kuasa Belanda atas Indonesia bertentangan dengan prinsip dekolonisasi sebuah negara, sebagaimana telah diatur dalam beberapa resolusi PBB, yaitu Resolusi PBB No. 1514 – XV, 2625 – XXV, 2621 – XXV dan beberapa konvensi PBB. Oleh karena Belanda sebagai penjajah tidak mempunyai hak hukum atas tanah yang dirampas, maka Indonesia pun tidak mempunyai hak

legalitas hukum apapun atas kepulauan melayu yang masing-masing adalah milik rakyatnya, termasuk Aceh (Djalil, 2009).

Berdasarkan Uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Teungku Hasan Di Tiro dalam Aceh Merdeka (1976-2005)”. Dikarenakan Teungku Hasan Di Tiro adalah seorang tokoh deklarator Gerakan Aceh Merdeka yang sebelumnya tidak lepas dari pengabdianya untuk Republik Indonesia hingga ia mendapatkan beasiswa di Amerika Serikat dan menjadi pegawai paruh waktu pada perwakilan RI untuk PBB . Penulis menetapkan tahun 1976 sebagai awal mula dimulainya Gerakan Aceh Merdeka yang mana pada Teungku Hasan Di Tiro kembali ke Aceh secara resmi dan mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka. Sedangkan tahun 2005 merupakan tahun dimana Gerakan Aceh Merdeka sepakat untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia.

Penelitian yang sejenis dengan topik penelitian yang akan dibahas, pertama yakni berjudul “Gagasan Politik Teungku Hasan Muhammad Di Tiro Tentang Nasionalisme Aceh” yang ditulis oleh Fadhil Ilhamsyah. Pada penelitian ini lebih menekankan pemikiran politik Teungku Hasan Di Tiro mengenai Nasionalisme Aceh yang dipengaruhi oleh sejarah Kejayaan Aceh pada masa lalu , sedangkan peneliti lebih menekankan gagasan politik yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pribadi Teungku Hasan Di Tiro serta strategi Teungku Hasan Di Tiro selama Gerakan Aceh Merdeka.

Penelitian yang dilakukan Monika Sari yang berjudul “Teungku Hasan Di Tiro: Sejarah Aceh Sebagai Pijakan Ideologi Dalam Aceh Merdeka” penelitian ini berfokus pada bagaimana pemikiran Teungku Hasan Di Tiro dalam ideologi Gerakan Aceh Merdeka melalui sejarah Aceh yang merupakan negara yang berdaulat jauh sebelum adanya Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah penelitian ini membahas pemikiran politik Teungku Hasan Di Tiro tentang konsepsi negara bangsa yang ideal berdasarkan sejarah Aceh, sedangkan penelitian yang diangkat peneliti lebih menekankan gagasan Teungku Hasan Di Tiro dalam pembentukan Gerakan Aceh Merdeka secara luas dan strategi Teungku Hasan Di Tiro dalam Gerakan Aceh Merdeka. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas Teungku Hasan Di Tiro dalam Kemerdekaan Aceh.

Penelitian yang dilakukan Abrar Muhammad Yus dengan judul “Pemikiran Dan Tindakan Politik Teungku Hasan Di Tiro” penelitian ini berfokus pada peranan Teungku Hasan Di Tiro sebagai tokoh dan pejuang dalam politik Aceh pasca kemerdekaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah bahwa penelitian ini hanya menjelaskan pemikiran serta aksi politik Teungku Hasan Di Tiro selama Gerakan Aceh Merdeka secara umum, sedangkan penelitian yang diangkat oleh peneliti berfokus pada strategi pergerakan dan gagasan Teungku Hasan Di Tiro dalam pembentukan Gerakan Aceh Merdeka. Sedangkan relevansi penelitian ini dengan penelitian yang diangkat peneliti ialah sama-sama

mengangkat pemikiran politik Teungku Hasan Di Tiro pada Gerakan Aceh Merdeka.

Penelitian selanjutnya berjudul “Sejarah Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (Gam) Di Aceh Tahun 1976-2005” yang ditulis oleh Murni Wahyuni, Isjoni, dan Bedriati Ibrahim. Penelitian ini lebih menekankan kepada peran politik apa saja yang pernah dilakukan Teungku Hasan Di Tiro pada kurun waktu 1976-2005, selain itu penelitian ini juga mendeskripsikan faktor dan mengetahui proses pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka yang dilakukan Teungku Hasan Di Tiro pada kurun waktu tahun 1976-2005. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diangkat peneliti terletak pada fokus pembahasan, fokus pembahasan peneliti ialah Gagasan Teungku Hasan Di Tiro dalam pembentukan Aceh Merdeka dan strategi pergerakan yang dilakukan Teungku Hasan Di Tiro dalam kurun waktu Orde Baru sampai reformasi yakni 1976-2005. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan yang diangkat peneliti ialah sama-sama membahas peran politik Teungku Hasan Di Tiro dalam Gerakan Aceh Merdeka dalam kurun waktu 1976-2005.

Penelitian yang berjudul “*The Imagined Community Of Indonesia: Pertentangan Nasionalisme Indonesia Vs Etnonasionalisme Bangsa Aceh Dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM)*” yang ditulis oleh Cut Maya Aprita Sari lebih menekankan pada aksi yang dilakukan oleh Teungku Hasan Di Tiro yang berhasil membangun sentimen etnis melalui penggunaan identitas etnis dan melawan nasionalisme Indonesia. Pemikiran Teungku Hasan Di

Tiro dalam penelitian ini difokuskan pada konsep nasionalisme menurut Teungku Hasan Di Tiro. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti angkat ialah penelitian ini hanya memfokuskan penelitiannya pada ruang lingkup etnis dan ideologi nasionalisme yang dianut oleh Teungku Hasan Di Tiro, sedangkan penelitian yang peneliti angkat membahas bagaimana gagasan Teungku Hasan Di Tiro dalam pembentukan Gerakan Aceh Merdeka dan Strategi pergerakan yang dilakukan dalam Aceh Merdeka. Sedangkan persamaannya terletak pada bagaimana Teungku Hasan Di Tiro sebagai tokoh deklarator Aceh Merdeka dengan pemikiran dan aksi politiknya mampu mendapat dukungan dari pengikut dan simpatisannya.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian yang baik selalu memiliki ruang lingkup yang tidak general dan cenderung tidak luas, perlu diberikan batasan dalam penulisannya, Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi secara spasial maupun temporal. Pembatasan dilakukan pada periodisasi waktu agar tidak semakin melebarnya kasus penelitian yang akan diteliti, tahun yang akan diambil antara rentang waktu 1976 hingga 2005. Pemilihan tahun 1976 dikarenakan itu adalah tahun Teungku Hasan DiTiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka dikarenakan Teungku Hasan Di Tiro menggunakan paham etnonasionalisme Aceh yang dilatarbelakangi oleh kejayaan Aceh masa lampau, yang bukan saja besar dan makmur, tetapi juga diakui dunia internasional. Selain itu pada

tahun 2005 menjadi akhir perjuangan dari Teungku Hasan Di Tiro dikarenakan adanya kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005 yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Sedangkan untuk Batasan spasial dalam penelitian ini adalah wilayah Aceh, dan wilayah-wilayah sekitar yang memiliki keterikatan secara historis. Sesuai dengan wilayah tersebut yang merupakan tempat Teungku Hasan Di Tiro melakukan Gerakan Aceh Merdeka di Aceh.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana gagasan Teungku Hasan Di Tiro dalam pembentukan Gerakan Aceh Merdeka ?
- b. Bagaimana strategi pergerakan Teungku Hasan Di Tiro dalam Gerakan Aceh Merdeka tahun 1976-2005?
- c. Apa yang melatarbelakangi penerimaan GAM terhadap upaya perdamaian di tahun 2005?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang gagasan dan strategi Teungku Hasan Di Tiro dalam Gerakan Aceh Merdeka untuk memajukan Aceh demi menyejahterakan dan memakmurkan rakyat Aceh. Dengan adanya tulisan ini diharapkan pembaca dapat mengenal

lebih dalam tokoh Teungku Hasan Di Tiro sebagai tokoh yang mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka serta menjadi pelajaran bagi generasi masa kini dan masa depan agar tidak lagi dihadapkan pada perpecahan ataupun pertentangan daerah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kajian sejarah nasional Indonesia pada masa Orde Baru sampai reformasi, khususnya mengenai peran Teungku Hasan Di Tiro pada masa itu. Selain itu, diharapkan pula penelitian ini dapat berguna bagi akademik dan penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah dalam menyikapi terjadinya sebuah pergolakan di daerah.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian sejarah atau metode historis. Metode penelitian sejarah menurut

Kuntowijoyo terdiri dari lima tahap, yaitu: pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2018).

Langkah pertama dalam metode historis adalah pemilihan topik. Menurut Kuntowijoyo, pemilihan topik sebaiknya berdasarkan pendekatan emosional dan pendekatan intelektual karena kedua hal tersebut memuat syarat penelitian yang subjektif dan juga objektif (Kuntowijoyo, 2018). Kedekatan emosional dalam melakukan penelitian ini karena peneliti memiliki kedekatan emosional dengan Aceh, dikarenakan penulis lahir dan pernah tinggal di Aceh. Sedangkan kedekatan intelektualnya yakni karena peneliti adalah mahasiswa pendidikan Sejarah yang mendapatkan pengetahuan dalam merekonstruksi peristiwa sejarah menggunakan metodologi Sejarah, peneliti tertarik dengan Teungku Hasan Di Tiro salah satu tokoh yang nasionalis semasa mudanya. Hingga akhirnya Teungku Hasan Di Tiro memilih berbalik melawan Republik Indonesia dan mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka, Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Teungku Hasan Di Tiro dalam Gerakan Aceh Merdeka.

Dalam tahap heuristik atau pengumpulan sumber. Pada tahap ini sumber yang digunakan untuk penelitian sejarah adalah sumber primer yang berupa wawancara dengan mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (mantan gerilyawan), serta arsip dokumen mengenai sosok Teungku Hasan Di Tiro. Adapun sumber sekunder, seperti buku, jurnal, dan surat kabar yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam pengumpulan sumber, penulis mengalami beberapa

kesulitan seperti narasumber dan arsip serta karya otentik dari Teungku Hasan Di Tiro. Mengenai narasumber ada beberapa narasumber yang penulis kiranya kredibel tidak bisa penulis dapatkan untuk di wawancarai seperti Wali Nangroe Malik Mahmud dan keluarga Teungku Hasan Di Tiro yakni Karim Tiro karna keterbatasan penulis. Namun, penulis tetap memiliki narasumber bernama Taufik Nurrahman, yang merupakan mantan aktivis dari Gerakan Aceh Merdeka dan merupakan sumber kredibel.

Tahap ketiga, verifikasi atau kritik sumber lisan dan tertulis. Pada tahap ini beberapa sumber yang sudah dilakukan pada tahap heuristik akan diverifikasi keasliannya dengan melihat tahun penulisan, jenis, penulis, hingga menguji kredibilitas narasumber.

Tahap keempat interpretasi atau penafsiran. Pada tahap ini penulis mengaitkan latar belakang keluarga dan latar pendidikan yang ditempuh Teungku Hasan Di Tiro dapat memengaruhi pemikiran dan semangat nasionalisme, namun juga latar belakang tersebut dapat mempengaruhi Teungku Hasan Di Tiro untuk berbalik melawan NKRI.

Peneliti juga menggunakan beberapa sumber sekunder sebagai pembanding, di antaranya seperti buku “Teungku Hasan Di Tiro: Jalan Panjang Menuju Damai Aceh” karya murizal hamzah, dan buku “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004” karya M. C. Ricklefs. Sumber yang telah didapatkan dan sudah melewati tahap verifikasi akan ditafsirkan oleh penulis dan mencari benang merah dengan sumber-

sumber lainnya.

Tahap kelima, historiografi atau penulisan sejarah. Penyajian hasil penelitian yang berjudul “Teungku Hasan Di Tiro Dalam Gerakan Aceh Merdeka (1976-2005)” disusun secara sistematis penulisan berjumlah lima bab, yaitu:

Bab pertama, membahas mengenai dasar pemikiran yang berisi bahasan mengenai latar belakang Gerakan Aceh Merdeka, gagasan Gerakan Aceh Merdeka dan profil dari Teungku Hasan Di Tiro. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai sejarah Aceh masa Kolonial dan Aceh pada masa kemerdekaan.

Bab ketiga akan membahas biografi Teungku Hasan Di Tiro pada tahun 1925-1976, Kehidupan Keluarga, serta pendidikan Teungku Hasan Di Tiro yang mempengaruhi Hassan Tiro dalam membentuk Gerakan Aceh Merdeka.

Bab Keempat akan membahas latar belakang Gerakan Aceh Merdeka, tujuan, strategi Teungku Hasan Di Tiro baik melalui jalur politik maupun melalui jalur militer, pada bab ini juga akan membahas tindakan pemerintah pusat untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka serta upaya yang dilakukan agar Aceh kembali bergabung dengan wilayah NKRI.

Bab kelima akan berisikan kesimpulan dari keempat bab di atas.

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah

2. Sumber Penelitian

Sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber tersebut berupa arsip/dokumen yang berkaitan dengan Gerakan Aceh Merdeka, wawancara dengan Taufik Nurrahman yang merupakan mantan anggota GAM, serta arsip deklarasi GAM dan perjanjian Perdamaian GAM yakni Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Sumber Primer yang digunakan adalah beberapa buku autobiografi yang ditulis langsung oleh Teungku Hasan Di Tiro yang berjudul “Perkara & Alasan Perdjjuangan Angkatan Atjeh” dan “Masa Depan Dunia Politik Melayu”. Selain itu, penulis juga mewawancarai pihak Eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka yaitu Taufik Nurrahman selaku mantan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1994. Penulis juga menggunakan dokumen sezaman seperti koran lama yang relevan dengan penelitian, yaitu koran Tempo dan Gamma. Sumber-sumber sekunder yang digunakan sebagai dokumen pendukung penelitian adalah buku, jurnal, dan artikel yang memuat informasi terkait dengan

Teungku Hasan Di Tiro dalam Gerakan Aceh Merdeka terutama gagasan serta strategi Teungku Hasan Di Tiro dalam GAM. Beberapa

buku, jurnal dan artikel tentang pemikiran Teungku Hasan Di Tiro juga digunakan sebagai referensi dan dokumen pendukung penelitian.



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*